

LAPORAN KEGIATAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

“PENYULUHAN TENTANG DAMPAK KETIDAKTAATAN PEMBAYARAN

IURAN BPJS”



Oleh:

Sri Rejeki Monica Suparlan, SKM.,M.HA
dr. Frankly Oktavian Palendeng, MARS
Chintami Luciana Watak, S.Kep.,Ns., M.Kes
Marvil Benediktus Wahani
Christina Manoppo
Jolita Kirwelakubun

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNUNG MARIA
TOMOHON
2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Allah, atas rahmatNya sehingga laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul “Penyuluhan Tentang Dampak Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS di RS Gunung Maria Tomohon” boleh terselesaikan.

Dalam laporan hasil kegiatan PKM ini membahas tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelayanan kesehatan. Proses ini penting mengingat hal ini sebagai salah satu syarat pelayanan pasien BPJS yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit guna memberikan layanan yang tepat dan cepat.

Maka dari itu kami tim PKM mengharapkan masukan-masukan dari pihak yang membaca laporan ini demi kemajuan dan kebaruan hasil kegiatan PKM serupa di masa mendatang.

Kami dari tim PKM mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pihak Pimpinan RS Gunung Maria Tomohon yang telah membantu dan memfasilitasi tim PKM mulai dari tahap permohonan pelaksanaan hingga pelaksanaan kegiatan ini.
2. Ketua STIKes Gunung Maria Tomohon yang memberikan kesempatan bagi tim PKM untuk pelaksanaan kegiatan PKM ini.
3. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIKes Gunung Maria Tomohon yang telah membantu dan menugaskan tim PKM.
4. Seluruh responden yang menjadi peserta kegiatan dan membantu tim sehingga acara berlangsung lancar.
5. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, kami ucapkan terima kasih.

Demikian kata pengantar kami, semoga hasil PKM ini bermanfaat bagi pembaca.

Tomohon, Agustus 2021

Ketua Tim,

Sri Rejeki Monica Suparlan

TIM PELAKSANA

1. JUDUL/TOPIK

**“PENYULUHAN TENTANG DAMPAK KETIDAKTAATAN
PEMBAYARAN IURAN BPJS DI RS GUNUNG MARIA TOMOHON”**

2. TIM PELAKSANA

Ketua Tim

Nama Lengkap : Sri Rejeki Monica Suparlan, SKM.,MHA
NIDN : 0901107404
Program Studi : Administrasi Rumah Sakit

Anggota 1

Nama Lengkap : dr. Frankly Oktavian Palendeng, MARS
NIDN/NUP : 8941260022
Program Studi : Administrasi Rumah Sakit

Anggota 2

Nama Lengkap : Chintami Luciana Watak, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIDN : 1612109301
Program Studi : Administrasi Rumah Sakit

Anggota 3

Nama Lengkap : Marvil Benediktus Wahani
NIM : 202102014
Program Studi : Administrasi Rumah Sakit

Anggota 4

Nama Lengkap : Christina Manoppo
NIM : 202102005
Program Studi : Administrasi Rumah Sakit

Anggota 5

Nama Lengkap : Jolita Kirwelakubun
NIM : 202102011
Program Studi : Administrasi Rumah Sakit

3. PELAKSANAAN

Sasaran Peserta : Pasien dan Keluarga pasien di RS Gunung Maria Tomohon
Lokasi : RS Gunung Maria Tomohon

4. BENTUK KEGIATAN : Penyuluhan dan Pemberian Edukasi Tentang Dampak Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS di RS Gunung Maria Tomohon.

5. BIAYA PELAKSANAAN : Rp. 5.000.000

LEMBAR PENGESAHAN

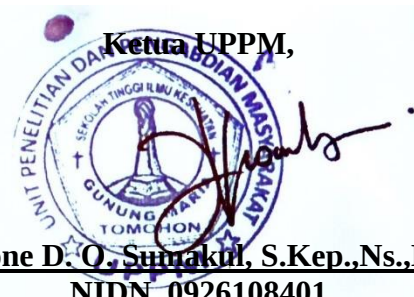
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT “PENYULUHAN TENTANG DAMPAK KETIDAKTAATAN PEMBAYARAN IURAN BPJS DI RS GUNUNG MARIA TOMOHON”

OLEH:

Sri Rejeki Monica Suparlan, SKM.,M.HA
dr. Frankly Oktavian Palendeng, MARS
Chintami Luciana Watak, S.Kep.,Ns., M.Kes
Marvil Benediktus Wahani
Christina Manoppo
Jolita Kirwelakubun

Tomohon, 23 September 2021

Telah Disetujui dan Disahkan Oleh:

Ketua UPPM,

DR. Vione D. O. Sunjakul, S.Kep.,Ns.,M.Kep
NIDN. 0926108401

Mengetahui
Ketua STIKes

Henny Pongantung, Ners.,MSN.,DN.Sc
NIDN. 0912106501

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TIM PELAKSANA.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN	4
D. MANFAAT KEGIATAN	4
BAB II TAHAPAN DAN METODE KEGIATAN	6
A. TAHAPAN KEGIATAN.....	6
B. METODE	8
C. ALAT KEGIATAN	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	10
A. HASIL	10
B. PEMBAHASAN	11
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	15
A. KESIMPULAN.....	15
B. SARAN	15
C. UCAPAN TERIMA KASIH.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Responden/Peserta Kegiatan PKM.....	10
------------	-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Lokasi Kegiatan PKM (Mitra)	3
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Satuan Acara Penyuluhan	18
Lampiran 2 Materi/Topik Tentang Hipertensi	20
Lampiran 3 Leaflet	21
Lampiran 4 Proses Kegiatan Penyuluhan	25
Lampiran 5 Dokumentasi PKM	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan dengan biaya terjangkau, melalui sistem pembiayaan yang berbasis iuran. Untuk mencapai tujuan tersebut, peserta BPJS Kesehatan diwajibkan membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk peserta mandiri, penerima bantuan iuran (PBI), maupun peserta yang ditanggung oleh pemberi kerja (PPU).

Namun, ketidaktaatan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh peserta dapat menyebabkan masalah serius, baik bagi peserta itu sendiri, rumah sakit, serta sistem kesehatan nasional secara keseluruhan. Ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat mempengaruhi keberlanjutan program JKN, dan memperburuk kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan merupakan kewajiban bagi peserta yang bergabung dalam program JKN. Iuran ini dibagi dalam berbagai kelompok, tergantung pada jenis peserta, seperti peserta mandiri, PBI (Penerima Bantuan Iuran), dan pekerja yang ditanggung oleh perusahaan. Namun, meskipun iuran ini telah ditetapkan, ketidaktaatan pembayaran seringkali terjadi, baik karena ketidaktahuan, kesulitan ekonomi, atau bahkan kesengajaan.

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS antara lain kesulitan ekonomi, banyak peserta, terutama peserta mandiri dan PBI, mengalami kesulitan untuk membayar iuran secara rutin, karena tingginya biaya hidup dan rendahnya pendapatan. Kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat tentang pentingnya membayar iuran BPJS secara tepat waktu, yang berdampak pada ketidaktaatan mereka. Keterlambatan administrasi terjadi karena

masalah administrasi di BPJS Kesehatan yang mengakibatkan peserta tidak menerima informasi yang jelas tentang kewajiban iuran mereka. Selain itu juga kendala akses peserta yang tinggal di daerah terpencil sering kali menghadapi kesulitan dalam melakukan pembayaran iuran, mengingat terbatasnya akses ke fasilitas pembayaran.

Ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat memiliki dampak yang luas, baik dari sisi peserta, rumah sakit, dan sistem JKN secara keseluruhan. Dampak pada Peserta BPJS yakni kehilangan akses layanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS. Jika peserta tidak membayar iuran dalam waktu tertentu, maka status kepesertaan mereka akan aktif, dan mereka tidak dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS. Selain itu juga masalah keterlambatan layanan kesehatan meskipun peserta memiliki status aktif, penundaan pembayaran iuran juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam mendapatkan perawatan yang diperlukan, seperti antrian yang lebih lama atau pembatasan pada jenis layanan yang diberikan.

Dampak pada Rumah Sakit yakni penurunan pembayaran klaim rumah sakit. Rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan seringkali mengalami keterlambatan dalam pembayaran klaim oleh BPJS, terutama jika ada ketidaktaatan dari peserta dalam membayar iuran. Hal ini dapat berdampak pada kelancaran operasional rumah sakit, karena mereka harus menanggung biaya perawatan peserta BPJS yang belum membayar.

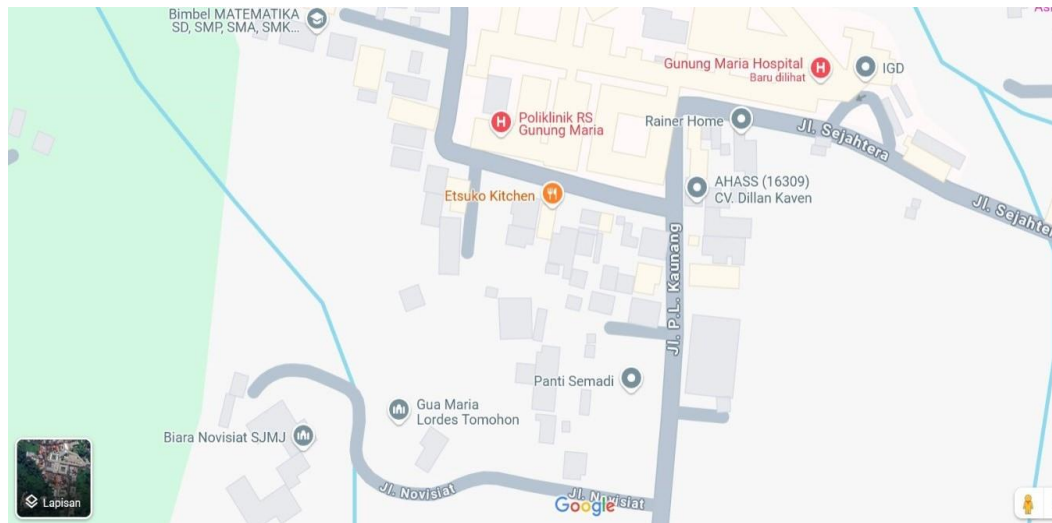
Dampak terhadap kualitas pelayanan yaitu rumah sakit yang kesulitan dalam mendapatkan pembayaran klaim dapat mengalami penurunan kualitas layanan atau kesulitan dalam menyediakan fasilitas medis yang optimal. Selain itu keterlambatan pembayaran iuran BPJS berdampak pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yakni defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Karena BPJS mengandalkan iuran untuk membiayai program JKN, ketidaktaatan dalam pembayaran dapat memperburuk ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya, yang pada akhirnya mempengaruhi keberlanjutan sistem. Meningkatnya beban pemerintah karena harus menanggung defisit BPJS melalui subsidi atau

peningkatan anggaran untuk menutupi kekurangan dana. Hal ini dapat berdampak pada anggaran kesehatan negara yang terbatas.

Ketidaktaatan dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi peserta, rumah sakit, maupun sistem JKN secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh masyarakat untuk memahami pentingnya kewajiban membayar iuran secara tepat waktu guna menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional ini. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus terus berinovasi dalam mempermudah akses pembayaran dan meningkatkan pemahaman masyarakat agar ketidaktaatan dalam pembayaran iuran dapat diminimalisir.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni untuk memberikan penyuluhan tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS di RS Gunung Maria Tomohon.

Peta Gambaran Umum dan Analisis Situasi Lokasi



Gambar 1. 1 Peta Lokasi Kegiatan PKM (Mitra)

Analisis situasi berdasarkan keterangan gambar peta lokasi pada gambar 1.1, terlihat bahwa lokasi mitra terletak di Kota Tomohon. Mitra ini mengalami peningkatan jumlah kunjungan pasien baik rawat jalan maupun inap. Rumah Sakit yang melayani pasien BPJS maupun asuransi kesehatan lainnya yang membuat

kunjungan pasien membludak. Meskipun demikian seringkali administrasi terganggu karena masalah keterlambatan pembayaran iuran BPJS. Untuk itu dibutuhkan penyuluhan tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memperlancar proses administrasi.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penyuluhan tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS di RS Gunung Maria Tomohon: Faktor apa sajakah yang menyebabkan keterlambatan pembayaran iuran BPJS di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon?

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Memberikan pasien pengetahuan tentang pendaftaran dan kebutuhan administrasi pasien sebelum mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan pengetahuan pada pasien tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS di RS Gunung Maria Tomohon.
- b. Memberikan pengetahuan pada pasien tentang faktor penyebab ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS di RS Gunung Maria Tomohon.

D. MANFAAT KEGIATAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah:

1. Bagi Institusi

Kegiatan PKM ini juga dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan pada pasien demi menciptakan kepuasan.

2. Bagi Pasien

Memberikan pasien pengetahuan tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS di RS Gunung Maria Tomohon.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Salah satu manfaat utama penyuluhan dan penatalaksanaan untuk meningkatkan pengetahuan pada pasien tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon.

BAB II

METODE KEGIATAN

A. TAHAPAN KEGIATAN

Berikut adalah tahapan kegiatan PKM yang akan dilakukan untuk topik penyuluhan tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon:

Tahap 1: Persiapan Kegiatan

1. Penyusunan Rencana Kegiatan

Membuat rencana kerja yang mencakup jadwal kegiatan, alur penyuluhan, dan penugasan tim, menyusun tujuan dan indikator keberhasilan penyuluhan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai harapan.

2. Pembentukan Tim Penyuluhan

Membentuk tim yang terdiri dari tenaga medis, petugas administrasi, dan anggota PKM untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, menunjuk koordinator kegiatan dan menentukan tugas masing-masing anggota tim.

3. Pengumpulan dan Penyusunan Materi Penyuluhan

Menyusun materi penyuluhan yang mencakup penjelasan tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS bagi peserta, rumah sakit, dan JKN.

4. Koordinasi dengan Rumah Sakit

Berkoordinasi dengan pihak manajemen RS Gunung Maria Tomohon mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan penyuluhan, menyusun jadwal kegiatan agar tidak mengganggu jam operasional rumah sakit.

5. Persiapan Logistik

Menyiapkan perlengkapan seperti proyektor, laptop, alat peraga (poster dan brosur), serta formulir evaluasi, serta menyiapkan tempat yang nyaman dan mudah diakses pasien, seperti ruang tunggu pendaftaran atau ruang informasi.

Tahap 2: Pelaksanaan Penyuluhan

1. Sosialisasi Prosedur Pendaftaran Pasien

Menyampaikan informasi tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS yang meliputi faktor penyebab, dampak dan lainnya.

2. Penyuluhan Tentang Dampak Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS

Menjelaskan dengan rinci dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS, seperti dampak bagi peserta, bagi rumah sakit, bagi JKN serta dampak lainnya.

3. Sesi Tanya Jawab

Mengadakan sesi tanya jawab di mana pasien atau keluarga pasien dapat mengajukan pertanyaan terkait dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS, memberikan solusi atau penjelasan terkait kendala yang sering terjadi dalam proses pendaftaran.

4. Distribusi Materi Edukasi

Membagikan brosur dan materi informatif kepada pasien yang sedang menunggu di ruang pendaftaran, memberikan penjelasan singkat tentang materi yang ada di brosur kepada pasien dan pengunjung rumah sakit.

Tahap 3: Evaluasi dan Umpan Balik

1. Pengisian Kuesioner Evaluasi

Setelah penyuluhan, pasien atau keluarga pasien diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan terkait pemahaman mereka tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS yang telah dijelaskan, kuesioner juga mencakup umpan balik mengenai materi penyuluhan dan efektivitas metode yang digunakan.

2. Diskusi Kelompok

Mengadakan diskusi kelompok kecil dengan beberapa pasien dan petugas administrasi untuk mendiskusikan apakah materi yang disampaikan sudah dimengerti dengan baik, menerima masukan dan saran dari peserta mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dalam penyuluhan.

3. Pengamatan Langsung

Tim penyuluhan akan mengamati langsung di loket pendaftaran untuk melihat apakah ada perubahan/peningkatan pembayaran iuran BPJS setelah penyuluhan dilakukan, apakah ada peningkatan pemahaman pasien.

4. Analisis Hasil Evaluasi

Menganalisis hasil kuesioner dan diskusi kelompok untuk mengetahui sejauh mana penyuluhan meningkatkan pemahaman pasien tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS, setelah itu menyusun laporan evaluasi yang berisi analisis tentang keberhasilan kegiatan penyuluhan dan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Tahap 4: Tindak Lanjut

1. Penyusunan Laporan Akhir

Menyusun laporan akhir yang berisi hasil kegiatan penyuluhan, analisis dari hasil evaluasi, serta rekomendasi untuk peningkatan pelayanan administrasi rumah sakit, laporan akan diserahkan kepada pihak manajemen rumah sakit untuk dipertimbangkan dalam perbaikan sistem administrasi di masa depan.

2. Tindak Lanjut untuk Perbaikan Prosedur

Jika ditemukan kendala atau kekurangan dalam proses pembayaran iuran BPJS yang diidentifikasi selama penyuluhan, rekomendasi tindak lanjut akan disampaikan kepada pihak rumah sakit untuk memperbaiki prosedur pembayaran iuran pasien.

3. Penyuluhan Berkelanjutan

Menyusun rencana untuk penyuluhan berkelanjutan yang dapat dilakukan secara rutin untuk pasien yang baru datang atau bagi keluarga pasien yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah metode observasi dan wawancara langsung dengan petugas pendaftaran di rumah sakit. Selain itu, data

juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari rumah sakit terkait prosedur dan persyaratan administrasi pasien. Berikut adalah langkah-langkah metodologi yang dilakukan:

1. Observasi: Mengamati proses pembayaran iuran BPJS pasien di beberapa rumah sakit yang terpilih, termasuk interaksi antara petugas pendaftaran dan pasien.
2. Wawancara: Melakukan wawancara dengan petugas administrasi rumah sakit untuk memahami dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS.
3. Studi Dokumentasi: Menganalisis berbagai dokumen yang digunakan selama proses pembayaran iuran BPJS.

C. ALAT KEGIATAN

1. Leaflet
2. LCD
3. Alat pengeras suara
4. Lain-lain

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021 di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon dengan melibatkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Maria Tomohon. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 31 orang, 3 orang dosen serta 3 mahasiswa. Diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar. Kegiatan diawali dengan sambutan singkat dari Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Maria Tomohon yang diwakilkan oleh dosen dan dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan.

Berikut hasil yang diperoleh dari kegiatan PKM yang dilakukan di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon pada tanggal 23 September 2021.

Tabel 3. 1 Karakteristik Responden/Peserta Kegiatan PKM

Umur Peserta	Frekuensi	Persentasi (%)
65-75 Tahun	12	38,8
76-85 Tahun	9	29
> 85 Tahun	10	32,2
Pendidikan	31	100
Tamat SD	15	48,8
Tidak tamat SMP	10	32,2
Tamat SMA	6	19
Total	31	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk karakteristik responden untuk kategori umur terlihat bahwa kategori umur 65-75 tahun merupakan responden terbanyak yaitu 12 orang (38,8%). Sementara responden dengan kategori umur 76-85 tahun yang paling sedikit yaitu sebanyak 9 orang (29%) dari total responden.

Demikian juga dengan karakteristik pendidikan responden, yang terbanyak peserta yang tamat SD sebanyak 15 responden (48,8%), tidak tamat SMP, yakni terbanyak kedua sebanyak 10 orang (32,2%). Sementara responden yang

pendidikannya tamat SMA terbanyak ketiga dengan jumlah 6 responden (19%) dari total responden.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berjalan lancar dan cukup berhasil serta berdampak pada ketaatan pembayaran iuran BPJS peserta.

B. PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS di RS Gunung Maria Tomohon. Hasil kegiatan ini juga menunjukkan terjadi peningkatan informasi dan pengetahuan bagi pasien dan keluarga. Di samping itu juga peserta menyatakan bahwa sudah cukup memahami tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS.

BPJS Kesehatan, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memiliki tujuan untuk menyediakan akses kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, ketidaktaatan dalam pembayaran iuran oleh peserta BPJS dapat menimbulkan dampak serius, baik bagi peserta itu sendiri, rumah sakit, maupun keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional secara keseluruhan.

Dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS berdasarkan hasil penelitian, jurnal, dan teori dari pakar yakni kehilangan akses layanan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2019) dalam menyatakan bahwa ketidaktaatan membayar iuran BPJS secara rutin menyebabkan peserta tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh status kepesertaan yang tidak aktif akibat keterlambatan pembayaran, sehingga peserta tidak dapat memanfaatkan fasilitas medis yang tersedia, baik di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya.

Penelitian oleh Wibowo (2020) dalam mengungkapkan bahwa peserta yang tidak aktif dalam program BPJS sering kali merasa cemas atau khawatir ketika membutuhkan perawatan medis mendesak, ini memberi dampak psikologis kepada peserta. Dampak sosial lainnya adalah stigma sosial yang muncul di

masyarakat terhadap individu yang tidak memiliki akses layanan kesehatan yang memadai, karena status mereka yang tidak terdaftar dalam program BPJS.

Ketidaktaatan peserta dalam pembayaran iuran BPJS dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit. BPJS Kesehatan bergantung pada iuran untuk membayar klaim rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Menurut Supriyadi (2021) dalam Jurnal Administrasi Rumah Sakit, keterlambatan pembayaran klaim ini dapat menyebabkan masalah keuangan bagi rumah sakit, terutama bagi rumah sakit yang lebih kecil atau yang memiliki ketergantungan besar terhadap pembayaran klaim dari BPJS. Rumah sakit dapat mengalami kekurangan dana untuk operasional dan pengadaan alat medis, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada pasien.

Ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS juga menyebabkan ketidakpastian dalam hal pembiayaan rumah sakit. Menurut Lestari dan Wulandari (2020) dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa ketidakpastian pembayaran klaim dari BPJS berdampak pada pengelolaan keuangan rumah sakit. Hal ini sering kali menyebabkan rumah sakit harus menanggung beban lebih besar untuk pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS yang belum membayar iuran, sementara pendapatan dari pasien non-BPJS mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya operasional rumah sakit.

Salah satu dampak paling signifikan dari ketidaktaatan pembayaran iuran adalah defisit anggaran yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Menurut Sutrisno (2018), menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan sering kali mengalami defisit anggaran yang besar, yang disebabkan oleh jumlah iuran yang tidak mencukupi untuk membiayai seluruh klaim medis peserta. Ketidaktaatan pembayaran iuran yang terus berlanjut memperburuk kondisi ini, sehingga mempengaruhi keberlanjutan sistem JKN secara keseluruhan.

Penelitian Mulyadi (2020), mengemukakan bahwa ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS dapat berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan program JKN. Jika sistem ini tidak dikelola dengan baik, BPJS Kesehatan mungkin kesulitan untuk membayar klaim rumah sakit, yang pada akhirnya akan

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program ini. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan ketidakpuasan peserta terhadap kualitas pelayanan dan menciptakan kesenjangan dalam akses kesehatan.

Menurut Sembiring (2021), menyatakan bahwa ketidaktaatan peserta BPJS Kesehatan menyebabkan peningkatan beban fiskal pada pemerintah. Pemerintah harus menanggung sebagian besar biaya jaminan kesehatan melalui APBN, yang mengarah pada ketergantungan anggaran negara untuk membiayai sistem kesehatan tersebut. Hal ini tentu saja mempengaruhi alokasi anggaran untuk sektor lain yang juga membutuhkan perhatian.

Menurut Raharjo (2020) dalam Jurnal Kebijakan Sosial menyatakan bahwa ketidaktaatan pembayaran iuran ini memperburuk kesenjangan sosial, di mana peserta yang membayar terpaksa menanggung beban lebih tinggi. Ketidakadilan ini berpotensi menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program BPJS Kesehatan, yang akan mempengaruhi cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam konteks jaminan kesehatan, Teori Keadilan Sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, mengajukan bahwa distribusi sumber daya harus dilakukan secara adil untuk memastikan setiap individu mendapatkan hak yang sama. Ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS bisa menciptakan ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan, dimana mereka yang taat membayar harus menanggung beban biaya yang lebih besar untuk peserta yang tidak membayar. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang mengutamakan kesejahteraan bersama.

Menurut Kenneth Arrow (2004) dalam teori ekonomi kesehatan mengemukakan bahwa dalam sistem jaminan kesehatan, ketidakpastian dan ketidakseimbangan informasi dapat mempengaruhi stabilitas sistem. Ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS memperburuk masalah ini karena dapat menambah ketidakpastian dalam pembiayaan kesehatan, yang mengarah pada ketidakseimbangan dalam distribusi dana dan pelayanan kesehatan.

Ketidakseimbangan ini akhirnya memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas program JKN.

Dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan tidak hanya dirasakan oleh peserta itu sendiri, tetapi juga berdampak pada rumah sakit, sistem jaminan kesehatan nasional, dan pemerintah. Ketidaktaatan ini menyebabkan hilangnya akses layanan kesehatan, keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit, dan defisit anggaran pada BPJS Kesehatan, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan program JKN. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik peserta, fasilitas kesehatan, maupun pemerintah, untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran iuran, guna menciptakan sistem jaminan kesehatan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam kegiatan pengabdian ini yakni terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman pasien tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS. Para pasien dan keluarga tampak antusias dalam mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir.

B. SARAN

Sebagai saran untuk Institusi Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon, agar lebih giat melaksanakan penyuluhan tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS. Pelaksanaan PKM ini dijadikan sebagai salah satu kebijakan kesehatan Pihak Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon untuk meningkatkan pelayanan kesehatan demi peningkatan kepuasan pasien.

C. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugerahnya sehingga Proses Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bisa terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih kami kepada Pimpinan dan seluruh Sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Maria Tomohon, atas dukungan dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini. Kemudian juga kepada seluruh pasien yang sudah membantu menyelesaikan kegiatan PKM ini, serta pihak Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Chang, H. Y., & Lee, R. (2017). *Public Health and Health Systems in Developing Economies: A Study of Health Insurance Schemes*. London: Palgrave Macmillan.
- Garrison, L. E., & Ferguson, T. R. (2018). *Health Insurance Systems: Global Perspectives and Local Challenges*. New York: Springer.
- Hadi, S. (2019). *Kebijakan Kesehatan dan BPJS: Teori, Praktik, dan Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Martinez, J. M., & Wenzel, J. R. (2021). The Impact of Non-Compliance with Health Insurance Premium Payments on Public Health Systems: A Global Perspective. *International Journal of Health Policy and Management*, 15(3), 213-227.
- McDonald, R. C., & Lee, J. S. (2020). Economic Consequences of Non-Payment in Public Health Insurance Systems. *Health Economics Review*, 10(1), 25-34.
- Mossialos, E., & Dixon, A. (2019). *Health Systems in Transition: A Comparative Analysis of Health Insurance Models*. Geneva: World Health Organization.
- Mulyani, H. (2019). Ketidaktaatan Masyarakat dalam Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dan Dampaknya Terhadap Penyediaan Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Kesehatan*, 7(3), 120-134.
- Mulyanto, S. (2017). *Manajemen Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia: Analisis dan Solusi Terhadap Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Naylor, D. C., & Prather, S. M. (2022). Non-Compliance and Its Impact on Healthcare Service Delivery in Low-Income Countries. *Global Health Action*, 15(4), 81-92.
- Pratama, D. I. (2020). Pengaruh Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 15(2), 85-97.
- Rodriguez, L. F., & Tan, J. H. (2019). The Relationship Between Non-Compliance and Financial Sustainability in Health Insurance Schemes. *Journal of Global Health*, 9(2), 98-112.

- Sari, R. S. (2021). Dampak Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS Terhadap Stabilitas Keuangan BPJS Kesehatan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan*, 8(1), 45-58.
- Sutrisno, B. A. (2022). Analisis Sosial Ekonomi Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kesehatan*, 10(2), 55-69.
- Suyanto, H. (2018). *Sistem Jaminan Kesehatan Nasional: Teori dan Praktik BPJS Kesehatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wolff, H. L., & Peterson, S. K. (2020). *Global Health Systems and the Economics of Health Insurance*. Oxford: Oxford University Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Satuan Acara Penyuluhan

DAMPAK KETIDAKTAATAN PEMBAYARAN IURAN BPJS.

Pokok Bahasan : Dampak Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS

Sub Pokok Bahasan :

1. Pengertian BPJS
2. Penyebab Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS
3. Dampak Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS
4. Upaya Mengatasi Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS

Hari / Tanggal : Kamis, Tanggal 23 September 2021

Tempat : RS Gunung Maria Tomohon

Waktu : 10.00-11.30 Wita

Sasaran : Pasien dan keluarga (Peserta BPJS)

Pembawa Materi : Dosen Prodi ARS (Tim PKM) STIKes Gunung Maria Tomohon.

A. TUJUAN

1. Tujuan

i. Tujuan Umum

Memberikan penyuluhan tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS. Setelah dilakukan penyuluhan, diharapkan pasien mampu mengetahui tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS.

ii Tujuan Khusus

- a. Memberikan pengetahuan kepada pasienpeserta BPJS tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS. Hal ini untuk kelancaran proses pelayanan kesehatan.

- b. Memberikan informasi yang akurat dan tepat, diharapkan pasien dapat memahami tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS.

B. ALAT BANTU

1. Leaflet
2. LCD
3. Alat pengeras suara
4. Lain-lain

Lampiran 2 Materi/Topik Tentang Dampak Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS

A. Pengertian BPJS

BPJS Kesehatan merupakan salah satu program jaminan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan akses kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Sebagai bagian dari sistem asuransi kesehatan nasional, iuran BPJS Kesehatan wajib dibayar oleh peserta untuk menjaga keberlanjutan layanan. Namun, ketidaktaatan masyarakat dalam membayar iuran menjadi masalah yang serius, yang dapat mempengaruhi keberlangsungan program ini dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

B. Penyebab Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktaatan dalam pembayaran iuran BPJS antara lain:

Keterbatasan Ekonomi: Banyak peserta yang mengalami kesulitan finansial, terutama di kalangan pekerja informal atau masyarakat dengan pendapatan rendah.

Kurangnya Pemahaman: Sebagian besar peserta mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya pembayaran iuran BPJS dan dampak ketidaktaatannya.

Administrasi yang Rumit: Proses pembayaran yang dianggap rumit atau sulit diakses bagi beberapa kelompok masyarakat juga berperan dalam rendahnya tingkat kepatuhan.

Tidak Memperoleh Manfaat Langsung: Peserta yang merasa tidak membutuhkan layanan kesehatan atau yang sudah merasa puas dengan alternatif pengobatan lain sering kali mengabaikan kewajiban pembayaran iuran.

C. Dampak Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS

Ketidaktaatan dalam pembayaran iuran BPJS memiliki dampak yang signifikan, baik bagi peserta maupun sistem kesehatan nasional secara keseluruhan:

1. Dampak Terhadap Keuangan BPJS

Ketidaktaatan pembayaran iuran mengurangi pendapatan yang dibutuhkan untuk membiayai program kesehatan yang lebih luas. Hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran pada BPJS Kesehatan, yang berisiko mengurangi kualitas layanan, memperburuk kelangsungan operasional, bahkan mengancam keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.

2. Penurunan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Keterbatasan dana akibat ketidaktaatan pembayaran dapat mengarah pada berkurangnya fasilitas dan tenaga medis, keterlambatan dalam pembayaran klaim kepada rumah sakit, serta pengurangan jumlah layanan kesehatan yang tersedia untuk peserta. Hal ini akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

3. Dampak Sosial Ekonomi

Ketidaktaatan pembayaran bisa memperburuk kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan di kalangan masyarakat. Masyarakat yang tidak terdaftar atau tidak aktif dalam BPJS mungkin akan kesulitan untuk mengakses layanan medis yang terjangkau, yang dapat mengarah pada peningkatan angka kemiskinan akibat biaya kesehatan yang tinggi.

4. Penyalahgunaan Sistem

Ketidaktaatan dalam membayar iuran juga dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan, di mana beberapa orang mungkin memanfaatkan layanan kesehatan tanpa berkontribusi pada pembiayaan sistem asuransi. Ini dapat menambah beban pada sistem kesehatan, karena biaya layanan yang harus ditanggung oleh BPJS meningkat tanpa adanya pendapatan yang seimbang.

5. Gangguan Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan

BPJS Kesehatan bergantung pada iuran peserta untuk memastikan tersedianya dana untuk melayani kebutuhan medis seluruh masyarakat. Ketidaktaatan pembayaran iuran dalam jumlah besar dapat memengaruhi

jangka panjang keberlanjutan program ini dan menyebabkan ketidakstabilan sistem jaminan kesehatan nasional.

D. Upaya Mengatasi Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS

Untuk mengatasi masalah ketidaktaatan pembayaran, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran iuran BPJS dan manfaatnya bagi kesehatan individu serta keberlanjutan program kesehatan nasional.
2. Inovasi Pembayaran: Menyederhanakan sistem pembayaran agar lebih mudah diakses, misalnya dengan menyediakan berbagai saluran pembayaran dan pengingat otomatis bagi peserta.
3. Insentif dan Sanksi: Memberikan insentif bagi peserta yang membayar tepat waktu atau dalam jumlah penuh, serta menerapkan sanksi bagi peserta yang terus-menerus tidak membayar.
4. Peningkatan Kualitas Layanan: Memberikan layanan yang lebih berkualitas dan transparan agar peserta merasa mendapatkan nilai lebih dari pembayaran iuran mereka.
5. Penataan Kebijakan Ekonomi: Menyusun kebijakan subsidi atau bantuan bagi peserta dari kalangan ekonomi lemah untuk memastikan mereka tetap dapat terdaftar dan membayar iuran.

Lampiran 3 Leaflet

Dampak Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS



Oleh:

Sri Rejeki Monica Suparlan
dr. Frankly Oktavian Palendeng
Chintami Luciana Watak
Marvil Benediktus Wahani
Christina Manoppo
Jolita Kirwelakubun

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
GUNUNG MARIA TOMOHON
2021

Apa itu BPJS?

BPJS Kesehatan merupakan salah satu program jaminan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan akses kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat

Penyebab Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS

Keterbatasan Ekonomi: Banyak peserta yang mengalami kesulitan finansial, terutama di kalangan pekerja informal atau masyarakat dengan pendapatan rendah.

Kurangnya Pemahaman: Sebagian besar peserta mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya pembayaran iuran BPJS dan dampak ketidaktaatannya.

Administrasi yang Rumit: Proses pembayaran yang dianggap rumit atau sulit diakses bagi beberapa kelompok masyarakat juga berperan dalam rendahnya tingkat kepatuhan.

Tidak Memperoleh Manfaat Langsung: Peserta yang merasa tidak membutuhkan layanan kesehatan atau yang sudah merasa puas dengan alternatif pengobatan lain sering kali mengabaikan kewajiban pembayaran iuran.

Dampak Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS

1. Dampak Terhadap Keuangan BPJS

Ketidaktaatan pembayaran iuran mengurangi pendapatan yang dibutuhkan untuk membiayai program kesehatan yang lebih luas.

2. Penurunan Kualitas Pelayanan Kesehatan Keterbatasan dana akibat ketidaktaatan pembayaran dapat mengarah pada berkurangnya fasilitas dan tenaga medis, keterlambatan dalam pembayaran klaim kepada rumah sakit, serta pengurangan jumlah layanan kesehatan yang tersedia untuk peserta.
3. Dampak Sosial Ekonomi Ketidaktaatan pembayaran bisa memperburuk kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan di kalangan masyarakat.
4. Penyalahgunaan Sistem Ketidaktaatan dalam membayar iuran juga dapat

menyebabkan terjadinya penyalahgunaan, di mana beberapa orang mungkin memanfaatkan layanan kesehatan tanpa berkontribusi pada pembiayaan sistem asuransi.

5. Gangguan Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan bergantung pada iuran peserta untuk memastikan tersedianya dana untuk melayani kebutuhan medis seluruh masyarakat. Ketidaktaatan pembayaran iuran dalam jumlah besar dapat memengaruhi jangka panjang keberlanjutan program ini dan menyebabkan ketidakstabilan

sistem jaminan kesehatan nasional.

Upaya Mengatasi Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS

1. Sosialisasi dan Edukasi
2. Inovasi Pembayaran
3. Insentif dan Sanksi
4. Peningkatan Kualitas Layanan
5. Penataan Kebijakan Ekonomi



Lampiran 4 Proses Kegiatan Penyuluhan

No	Kegiatan Penyuluh	Kegiatan Audiens/Sasaran	Waktu
1	Pembukaan a. Moderator memberi salam b. Moderator memperkenalkan anggota penyuluhan c. Moderator memperkenalkan pemberi materi d. Moderator menjelaskan tentang topik penyuluhan e. Menjelaskan dan membuat kontrak waktu, bahasa, tujuan dan tata tertib penyuluhan	1. Menjawab salam 2. Mendengarkan dan memperhatikan 3. Mendengarkan dan memperhatikan 4. Mendengarkan dan memperhatikan 5. Mengemukakan pendapat	5 menit
2	Pelaksanaan a. Mengkaji pengetahuan audiens mengenai pengertian BPJS b. Memberi reinforcement (+) c. Menjelaskan tentang pengertian BPJS. d. Mengkaji pengetahuan audiens tentang penyebab ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS. e. Memberi reinforcement (+) f. Menjelaskan tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS. g. Mengkaji pengetahuan audiens tentang dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS. h. Memberi <i>reinforcement</i> (+) i. Memberi <i>reinforcement</i> (+) j. Mengkaji pengetahuan audiens tentang penyebab dan dampak ketidaktaatan pembayaran iuran BPJS k. Memberi <i>reinforcement</i> (+) l. Mengulang kembali yang telah dijelaskan	1. Mengemukakan pendapat 2. Mendengarkan dan memperhatikan 3. Mengemukakan pendapat 4. Mendengarkan dan memperhatikan 5. Mengemukakan pendapat 6. Mengemukakan pendapat 7. Mendengarkan dan memperhatikan	40 menit

	Penutup		
	a. Memberi kesempatan audiens untuk bertanya	1. Mengajukan pertanyaan	15 menit
	b. Menjawab pertanyaan	2. Mendengarkan dan memperhatikan	
	c. Meminta audiens mengulang beberapa informasi yang telah diberikan	3. Mengemukakan pendapat.	
	d. Memberi reinforcement (+)	4. Mendengarkan	
	e. Bersama peserta menyimpulkan materi	5. Menjawab salam	
	f. Menutup dengan salam		

F. EVALUASI

1. Persiapan : Dampak Ketidaktaatan Pembayaran Iuran BPJS di RS Gunung Maria Tomohon
2. Proses : Penyuluhan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dihadiri oleh sekitar 31 pasien belum termasuk dosen dan mahasiswa
3. Hasil :
 - a. Sasaran : Pasien dan keluarga (peserta BPJS)
 - b. Penyampaian Materi : Ceramah, tanya jawab
 - c. Penerimaan Materi : Materi mampu diterima oleh peserta dengan baik
 - d. Validasi hasil penjelasan : Peserta dapat menjelaskan kembali materi yang diberikan.
 - e. *Reinforcement* Peserta: memberikan *reinforcement*

Lampiran 5 Dokumentasi PKM

